



Pembangunan Kemiskinan: Implementasi Falsafah *Banteng Loreng Binoncengan* dalam Relasi Patron-Klien Kelompok Nelayan Kota Tegal

Elsa Lutmilarita Amanatin^{1*}, Bintarsih Sekarningrum¹, Budiawati Supangkat¹

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 29, 2023

Revised July 06, 2024

Accepted July 15, 2024

Available online August 31, 2024

Kata Kunci:

Kemiskinan; Nelayan; Patron-Klien; Wilayah Pesisir

Keywords:

Poverty; Fishermen; Patron-Client; Coastal Area



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas pola hubungan patron-klien di antara masyarakat nelayan Muarareja Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan memperdalam pemahaman tentang bagaimana relasi patron-klien dapat meningkatkan ekonomi, serta dampak dari falsafah banteng loreng binoncengan dan modal sosial dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Muarareja Kota Tegal. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan kajian teori modal sosial milik Bourdieu sebagai alat analisis untuk mengeksplorasi konteks relasi patron-klien di Muarareja. Penelitian ini melibatkan nelayan juragan, bakul ikan, dan nelayan ABK/anak buah kapal sebagai subjek penelitian, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat di antara nelayan dan bakul ikan di Muarareja memiliki peran krusial dalam dinamika ekonomi mereka, memfasilitasi akses terhadap modal yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan mendesak. Selain itu, relasi patron-klien yang didasarkan pada falsafah banteng loreng binoncengan memberikan kontribusi

signifikan dalam membangun jaringan sosial yang kuat, dengan dampak positif ekonomi dan sosial bagi kedua belah pihak. Sehingga, melalui nilai-nilai tersebut, nelayan dapat memperkuat kerja sama yang berkelanjutan dan adil, serta meningkatkan kesejahteraan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Rekomendasi praktis atas temuan penelitian ini mencakup perlunya pendirian pusat pelatihan bagi nelayan dan kelompok usaha bersama guna memperkuat solidaritas.

ABSTRACT

This study examines the patterns of patron-client relationships among the fishing communities of Muarareja, Tegal City. It aims to fill knowledge gaps by deepening understanding of how patron-client relationships can enhance economic outcomes and the impact of the banteng loreng binoncengan philosophy and social capital in fostering sustainable economic development in Muarareja, Tegal City. The research employs a qualitative approach with a phenomenological framework and Bourdieu's social capital theory as analytical tools to explore the context of patron-client relationships in Muarareja. Participants include fishing boat owners (juragan), fish wholesalers (bakul ikan), and crew members (ABK), with data collected through in-depth interviews, observations, and documentary studies. Findings reveal that strong social capital among fishermen and fish wholesalers in Muarareja plays a crucial role in their economic dynamics, facilitating access to flexible and responsive capital to meet urgent needs. Moreover, patron-client relationships grounded in the banteng loreng binoncengan philosophy significantly contribute to building strong social networks, with positive economic and social impacts for both parties. Thus, through these values, fishermen can strengthen fair and sustainable cooperation, enhancing well-being amidst complex economic and social challenges. Practical recommendations from this study include establishing training centers for fishermen and collective business groups to bolster solidarity.

*Corresponding author

E-mail addresses: elsa22008@mail.unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah laut dan jangkauan teritorial samudra yang sangat luas (Lauder & Lauder, 2016). Bahkan jika melihat dari spesies yang hidup di lautnya saja, maka menurut Syafei dan Sudinno (2018) Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai kawasan megabiodiversitas terbesar di dunia dengan kekayaan jenis ikan nomor tiga tertinggi, setelah Negeri Samba Brasil dan Tiongkok. Potensi tersebut selayaknya memberi harapan besar guna mendukung pembangunan ke depan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang makmur melalui hasil sumber daya kelautannya (Darmin, 2023; Safitri, 2018; Satria, 2015). Namun, pada kenyataannya hal tersebut masih belum mampu berkontribusi selaras dalam memberikan kemakmuran terhadap perekonomian masyarakat nelayan. Hal itu karena kondisi masyarakat pesisir Indonesia masih lekat kaitannya dengan karakteristik kelompok nelayan yang relatif tertinggal secara ekonomi dan lekat dengan jerat kemiskinan (Winda, 2023).

Kota Tegal yang terletak di wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah memiliki keistimewaan karena dapat berbatasan langsung dengan Laut Jawa (Mamengko & Kuntari, 2021). Tidak heran jika kemudian kota ini dikenal sebagai Kota Bahari karena sektor kelautan Kota Tegal yang sangat melimpah sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan aktivitas dan hasil laut sebagai profesi utamanya, baik sebagai nelayan maupun buruh nelayan. Berdasarkan sumber dari Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK) Kota Tegal tahun 2023, jumlah penduduk di Kelurahan Muarareja mencapai 8.052 orang (Kementerian Dalam Negeri RI, 2023). Mayoritas penduduk yang bekerja memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, sebanyak 1.773 orang. Sementara itu, total pedagang di sektor perikanan mencapai 372 orang. Namun, jumlah tersebut masih lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang tidak bekerja, yaitu sebanyak 2.258 orang. Meski dikenal memiliki kawasan maritim yang potensial, hal itu ternyata tidak lantas menghentikan jerat kategori keluarga kurang sejahtera pada kawasan masyarakat nelayan pesisir di Kota Tegal ini (Rohayati et al., 2018). Hal itu sebagaimana dapat dilihat dari jumlah pengangguran yang masih jauh lebih mendominasi daripada jumlah nelayan aktif yang bekerja. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai Kota Bahari sektor perikanan tetap menjadi andalan dan denyut nadi dari masyarakat pesisir di sini (Alamsyah et al., 2023).

Terdapat dua wilayah di Kota Tegal yang populasi mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, yakni kawasan Tegalsari dan Muarareja. Selayaknya karakter khas pesisir, pada kedua wilayah tersebut pun memiliki TPI (Tempat Pelelangan Ikan) masing-masing (Taufik, 2022). Hanya saja, TPI di kedua wilayah kini berjalan dengan kondisi berbeda, TPI Jongor yang terletak di Tegalsari kini masih nampak aktivitas jual-beli ikan melalui sistem tawar-menawar di TPI untuk kemudian dijual kepada konsumen sekitar yang datang, namun di kawasan Muarareja aktivitas tersebut sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kawasan pesisir Kota Tegal, khususnya Muarareja, menjadi lokasi ideal bagi penelitian karena menunjukkan dinamika ekonomi yang kompleks di sektor perikanan. Ditambah, nelayan Muarareja umumnya adalah masyarakat nelayan yang berada dalam kondisi keterbatasan (Putri et al., 2021). Aktivitas jual-beli ikan yang dahulu ramai melalui sistem tawar-menawar di TPI, saat ini sudah tidak ada. Hal itu disebabkan oleh dominasi perjanjian hutang antara nelayan sebagai pemilik kapal dengan *bakul* ikan pemilik depot, yang berimplikasi menumbangkan interaksi ekonomi langsung di TPI.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam guna memahami transformasi hubungan patron (*bakul* ikan) dan klien (nelayan) yang berdampak terhadap perubahan struktur sosial dan ekonomi. Secara lebih lanjut, hubungan patron-klien pada masyarakat nelayan Muarareja tersebut dapat dilihat sebagai adanya hubungan patron yang secara ekonomi memiliki kemampuan lebih untuk membantu memberikan pinjaman modal, sehingga klien yang dibantu kemudian membalas kebaikan tersebut melalui pemberian komitmen untuk menyediakan jasanya sebagai wujud balas budi (Shaleh et al., 2021). Hal ini selaras dengan berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti petakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keuntungan Hubungan Patron dan Klien dalam Komunitas Nelayan

Keuntungan Klien	Keuntungan Patron
Mendapat kredit untuk penghidupan dan modal untuk investasi (Islam & Chuenpagdee, 2022; McWilliam et al., 2021; Nunan et al., 2020; Roberts et al., 2022; Samah et al., 2023; Stacey et al., 2021)	Loyalitas (Emy, 2020; Roberts et al., 2022; Samah et al., 2023; Shigefuji, 2024)

Keuntungan Klien	Keuntungan Patron
Mendapat pinjaman fleksibel (Elsler et al., 2023; Leniwati et al., 2022; Suyono et al., 2021)	Tenaga kerja (Irawan, 2022; Kunyati & Marta, 2022a; Marhadi et al., 2023)
Memiliki penolong dalam masa sulit (Emy, 2020; Roberts et al., 2022; Suyono et al., 2021)	Prestise sosial (McWilliam et al., 2021; Samah et al., 2023; Utami et al., 2023)
Dapat meminjam peralatan berlayar (Nunan et al., 2020; Samah et al., 2023; Shigefuji, 2024)	Sumber informasi tentang pesaing/musuh (Handayani et al., 2022; Nunan et al., 2020)
Mempunyai payung hukum (Shigefuji, 2024; Suyono et al., 2021)	Dukungan Politik (Emy, 2020; Frawley et al., 2024; Suyono et al., 2021)
Penyedia akses ke pasar (Dashfordate & Winoto, 2023; Elsler et al., 2023; McWilliam et al., 2021)	Menghasilkan dengan harga murah (Dashfordate & Winoto, 2023; Humbas, 2021; Roberts et al., 2022)
Dukungan pribadi, misalnya pemberi nasihat dan jembatan perjodohan (Elanda & Alie, 2021; Frawley et al., 2024; Munguia-Vega et al., 2022; Roberts et al., 2022)	
Akses ke sumber daya (Dashfordate & Winoto, 2023; Elsler et al., 2023; Munguia-Vega et al., 2022)	
Akses ke informasi (Dashfordate & Winoto, 2023; Roberts et al., 2022; Samah et al., 2023)	

Sumber: Data Sekunder Penelitian, 2024

Pola relasi patron-klien dengan berbagai keuntungan yang tertera pada Tabel 1 tersebut nampak pada praktik masyarakat nelayan Muarareja baik antar *bakul* dan juragan/nelayan pemilik kapal, maupun antar juragan dan nelayan ABK. Pada praktik patron klien antar *bakul* dan juragan seringkali nampak pada relasi ketika *bakul* memberikan modal kepada juragan ketika akan membeli kapal, sehingga kemudian pemilik kapal mendedikasikan hasil tangkapannya untuk langsung diutamakan dijual pada *bakul* yang memberi modal tersebut. Keuntungan bagi *bakul* adalah ia mendapatkan harga yang lebih murah daripada harus membeli di nelayan lain, meski dampaknya kemudian mempengaruhi matinya kegiatan jual-beli di TPI Muarareja. Sementara relasi patron-klien pada hubungan juragan dan ABK ditunjukkan melalui pemberian kesempatan untuk ikut berlayar bersama juragan secara terbuka tanpa harus menetapkan kriteria memiliki relasi kekerabatan terlebih dahulu, juragan dan ABK yang telah menjadi *partner* berlayar yang langgeng kemudian akan menganggap satu sama lain sebagai keluarga dengan juragan rela banyak membantu kehidupan ABK dan ABK akan semakin setia menjadi *partner* berlayarnya kapanpun dan kemanapun.

Hal tersebut secara lebih lanjut sebenarnya dapat dilihat sebagai implementasi bentuk falsafah lokal orang Tegal yakni *banteng loreng binoncengan*. Falsafah ini dilihat sebagai penggambaran watak orang Tegal yang gagah berani dan kritis (Syahmadani, 2016), namun dapat dituntun oleh pemimpin yang lemah lembut dan ramah (Achmad, 2022). Dalam konteks penelitian, falsafah ini tercermin dalam pola relasi patron-klien di kelompok masyarakat nelayan Muarareja. Melalui falsafah ini, ditekankan pentingnya kolegialitas dan solidaritas yang tinggi di antara anggota masyarakat, khususnya dalam pola relasi patron-klien yang terlihat antara nelayan dan *bakul* ikan di Muarareja. Ringkasnya, peneliti dapat memahami dinamika sosial dan hubungan hierarkis di dalam komunitas tersebut melalui lensa falsafah ini, serta menggali lebih dalam tentang nilai-nilai lokal dan strategi adaptasi sosial yang terlibat dalam interaksi sehari-hari masyarakat nelayan di sana.

Berbagai penelitian telah dilangsungkan di Muarareja, diantaranya penelitian Bakhtiar et al. (2020) yang menunjukkan bahwa implementasi proyek *Co-Fish* yang dilakukan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan memperbaiki infrastruktur, sanitasi, dan pengembangan kelembagaan sosial ekonomi dapat memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan dan konflik nelayan, hanya saja belum dapat secara masif dapat dirasakan seluruh golongan nelayan dari kelompok kecil seperti ABK. Penelitian Putri et al. (2021) menghasilkan temuan bahwa adanya organisasi kelompok nelayan di Kelurahan Muarareja dapat berperan sebagai pengelola keuangan kelompok yang berimplikasi pada meningkatnya solidaritas antar anggota kelompok yang membutuhkan bantuan, meski tingkat perawatan kelompok melalui re-organisasi masih belum optimal.

Sementara itu, penelitian Rohayati et al. (2018) menghasilkan temuan bahwa nelayan kecil di Muarareja digolongkan sebagai nelayan miskin yang tidak absolut, meski demikian regulasi untuk menghapus kemiskinan sangat perlu dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah maupun pusat

dengan memberikan alternatif pekerjaan ketika nelayan kecil sedang tidak berlayar dan menggiatkan sosialisasi untuk menanamkan budaya menabung di kalangan istri-istri nelayan maupun nelayan kecil itu sendiri. Penelitian Alamsyah et al. (2023) juga menunjukkan temuan serupa yang mengindikasikan masih sangat perlunya kerja sama antar pemangku kepentingan di bidang perikanan tangkap untuk mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Kota Tegal. Serta penelitian Mudzakir et al. (2023) juga menunjukkan temuan bahwa intervensi pemerintah belum optimal, nampak dari masih sering nihilnya pemberian bantuan alokasi BBM yang sebenarnya dapat menjadi solusi alternatif untuk modal kebutuhan melaut dan belum adanya program pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Tegal menjadikan kehidupan masyarakat nelayan terus berputar dengan isu kemiskinannya. Dengan demikian, kesemua kajian tersebut belum ada yang memfokuskan pada bahasan pembangunan kemiskinan yang dapat ditinjau melalui pemanfaatan kekuatan pola relasi patron-klien yang terbentuk di kalangan nelayan urban Muarareja yang sebetulnya dapat dilihat melalui wujud falsafah *banteng loreng binoncengan* sebagai adagium yang dimiliki masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan mengisi gap dengan memberikan pemahaman lebih optimal berdasarkan penelitian terdahulu di Muarareja. Fokusnya adalah menjawab pertanyaan spesifik mengenai bagaimana akses peluang relasi patron-klien dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi? Bagaimana falsafah *banteng loreng binoncengan* mempengaruhi hubungan patron-klien? Lalu, apa peran modal sosial dalam memperkuat hubungan ini untuk pembangunan ekonomi? Pertanyaan ketiga pada penelitian ini sekaligus akan mengeksplorasi potensi pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan melalui pendekatan integratif yang memanfaatkan falsafah *banteng loreng binoncengan*. Selanjutnya, analisis fenomena patron-klien menggunakan teori modal sosial Bourdieu (2018), yang menekankan pentingnya jaringan sosial dan sumber daya yang dihasilkannya. Hasil analisis akan menjadi acuan untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang dapat diimplementasikan oleh para aktor terlibat.

Teori modal sosial Bourdieu (2018) menunjukkan bahwa jaringan dan relasi sosial dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial, oleh karenanya teori ini menjadi penting dalam analisis relasi patron-klien nelayan di Muarareja. Modal sosial, menurut Bourdieu (2011) merupakan aset kolektif yang memberikan keuntungan ekonomi dan sosial berdasarkan jaringan dan volume modal yang dimiliki. Tiga elemen modal sosial Bourdieu yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akses ke sumber daya melalui hubungan sosial, jumlah dan kualitas sumber daya dalam hubungan patron-klien, serta pemeliharaan modal sosial melalui kepercayaan, solidaritas, norma, dan etika. Modal sosial yang kuat memungkinkan peningkatan posisi sosial dan ekonomi melalui relasi patron-klien yang terjalin (Bourdieu, 1983).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami konteks relasi patron-klien di kalangan nelayan Muarareja. Pendekatan fenomenologi dipilih sebagai kerangka teoretis utama yang memungkinkan peneliti untuk menggali hakikat pengalaman manusia terhadap fenomena relasi patron-klien secara mendalam. Langkah pertama dalam implementasi pendekatan ini adalah melibatkan partisipan penelitian yang merupakan *bakul* ikan dan nelayan aktif di Muarareja. Setelah itu peneliti mengambil data melalui wawancara mendalam, observasi langsung untuk menggali pengalaman informan dalam interaksi sehari-hari, serta mengambil berbagai data studi dokumentasi selama berada di lapangan. Instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian dikembangkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian guna menggali informasi yang mendalam dan relevan dari para subjek (Moleong, 2021). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena relasi patron-klien secara teoretis, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman subjektif nelayan dalam konteks kompleksitas ekonomi dan sosial Muarareja Kota Tegal.

Kemudian, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri yang terlibat langsung dalam pengumpulan data di lapangan. Subjek penelitian adalah komunitas nelayan di Muarareja Kota Tegal, yang meliputi nelayan juragan, *bakul* ikan, dan nelayan ABK. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada tanggal 1 Juni-28 Agustus 2023 yang diajukan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait relasi patron-klien di sana. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan teknik *snowball sampling* bersama 6 juragan atau nelayan pemilik kapal, 5 anak buah kapal (ABK), 6 pengepul atau penjual

ikan (*bakul*). Meskipun teknik *snowball sampling* kerap menghadapi tantangan dalam memastikan representasi yang seimbang dari berbagai kelompok, penelitian ini mengatasi masalah tersebut dengan strategi triangulasi sumber. Peneliti memastikan bahwa setiap kelompok informan memberikan perspektif yang cukup dengan melakukan wawancara mendalam hingga mencapai kejenuhan data, yaitu ketika tidak ada informasi baru yang muncul dari wawancara tambahan. Untuk memastikan representasi yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan observasi langsung di sekitar TPI Muarareja, dermaga, depot penjualan ikan, dan tempat servis kapal. Lalu, mendokumentasikan kegiatan harian para nelayan juragan, ABK, *bakul*, dan ibu-ibu pekerja serabutan di sana. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan ekonomi dari berbagai sudut pandang.

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil penelitian terdahulu maupun artikel berita yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang sudah dikumpulkan. Peneliti melakukan *cross-checking* informasi yang diperoleh dari berbagai informan untuk memvalidasi data dan memastikan akurasi. Dengan demikian, peneliti dapat memeriksa ulang keabsahan data yang telah terkumpul secara terorganisir dan menyajikan data yang ada secara aktual serta akurat. Oleh karenanya, penelitian ini dapat berhasil mengumpulkan perspektif yang beragam dan mendalam dari semua kelompok nelayan melalui pemberian gambaran yang komprehensif tentang relasi patron-klien di Muarareja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses Peluang dalam Relasi Patron-Klien

Pada dasarnya mayoritas penduduk di kawasan Muarareja di dominasi oleh kelompok masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan (Vibriyanti, 2014). Terbukti dari total 4.573 penduduk, 3.297 (72.1%) diantaranya menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai nelayan (BPS Kota Tegal, 2021; Putri et al., 2021). Berlangsungnya kehidupan khas pesisir yang ada di Muarareja ditunjukkan dengan banyaknya tambak yang mengelilingi wilayah tersebut, galangan kapal besar dan kecil yang bertengger di sepanjang Kali Kemiri, banyaknya produksi ikan asin di sepanjang jalan, dan dimilikinya tempat pelelangan ikan atau TPI yang kini terbengkalai. Padahal berdasarkan data penelitian yang sudah ada sebelumnya, TPI yang berfungsi dengan baik akan mampu memberikan suasana yang transparan dan terstruktur untuk menjual hasil tangkapan, memungkinkan nelayan memperoleh harga yang lebih adil tanpa harus bergantung pada *bakul* yang sering memotong harga sebagai bagian dari kontrak hutang yang disepakati (Kusumawati et al., 2024). Selain itu, penelitian oleh Hansyaekh (2022) juga menunjukkan bahwa akses ke TPI yang berfungsi baik dapat meningkatkan pendapatan nelayan hingga 30% karena adanya transparansi harga dan persaingan sehat di antara pembeli.

Selain itu, perbaikan TPI juga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, tidak hanya bagi *bakul* lokal tetapi juga bagi pembeli dari luar daerah yang mencari produk segar dan berkualitas. Penelitian oleh Hu et al. (2022) menyebutkan bahwa revitalisasi infrastruktur pesisir seperti TPI dapat meningkatkan daya saing produk perikanan lokal di pasar regional dan nasional, memberikan nelayan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Lebih lanjut, perbaikan infrastruktur ini juga bisa membawa dampak positif pada aspek sosial-ekonomi lainnya, seperti peningkatan lapangan pekerjaan di sektor perikanan dan pengolahan hasil tangkapan, serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas nelayan melalui pelatihan yang bisa diselenggarakan di fasilitas yang memadai. Hal ini selaras dengan temuan dari Rahmiyati dan Rachmawati (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur pesisir tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sosial masyarakat pesisir. Oleh karena itu, secara keseluruhan, dengan memperbaiki dan mengaktifkan kembali TPI yang terbengkalai sebagaimana terlihat pada Gambar 1 yang mewakili potret Muarareja saat ini, nelayan akan dapat memperoleh banyak manfaat dari segi ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.



Gambar 1. Kondisi TPI Muarareja (Sumber: Data Primer Penelitian, 2023)

Terbengkalainya TPI Muarareja sekaligus menjadi simbolis betapa kuatnya relasi patron-klien yang diteguhkan oleh kelompok nelayan di wilayah tersebut. Kondisi itu dihasilkan karena mayoritas juragan atau nelayan pemilik kapal yang terikat dengan pihak yang memberikan modal, dalam hal ini adalah *bakul* ikan. Pemberi modal yakni *bakul* atau penjual ikan yang umumnya memiliki depot pribadi untuk berdagang memanfaatkan kerja sama dengan memberikan hutang kepada nelayan untuk memastikan para nelayan mengutamakan menjual hasil tangkapannya kepada mereka. Maraknya praktik tersebut telah berdampak pada tidak terfungsikannya TPI sebagaimana mestinya. Pihak *bakul* dalam upayanya meminta kesepakatan bahwa pihak juragan yang berhutang harus siap menjadi produsen yang berkomitmen menjualkan hasil tangkapannya kepada mereka, selama hutang belum lunas sepenuhnya, dengan kesepakatan potongan 2% lebih murah dari biaya pada umumnya (perbandingan dengan harga umum). Sistem potongan terhadap hasil tangkapan tersebut tidak termasuk dalam serangkaian pelunasan hutang, pembayaran hutang masih bersifat absolut, artinya harus dilakukan secara langsung dan terpisah oleh nelayan peminjam dengan atau tanpa sistem cicil. Secara lebih jelas perbedaan pendapatan nelayan yang terikat hutang dan yang tidak terikat hutang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Pendapatan Nelayan yang Memiliki Hutang dan yang Tidak

Status Hutang	Rata-Rata Hasil Tangkapan	Harga yang Ditentukan Pihak <i>Bakul</i>	Total Pendapatan Maksimum
Tidak Memiliki Hutang	3 Ton	Rp 24.000/kg	Rp 72.000.000
Memiliki Hutang	3 Ton	Rp 22.0000/kg	Rp 66.000.000

Sumber: Data Primer Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 2, nampak nelayan yang tidak terikat hutang mampu menjual hasil tangkapannya dengan harga maksimal, yaitu 24 ribu rupiah per kilogram. Sebaliknya, nelayan yang terikat hutang hanya bisa menjual hasil tangkapannya dengan harga 22 ribu rupiah per kilogram. Meskipun perbedaan 2 ribu rupiah per kilogram tampak kecil, dampaknya sangat signifikan ketika diterapkan pada hasil tangkapan 3 ton yang mereka peroleh dengan kapal berukuran 9-12 GT. Dalam hal ini, selisih pendapatan mereka atas penjualan ikan pun berbeda sebanyak 6 juta rupiah, yang tentu berdampak langsung pada pendapatan total nelayan, baik juragan maupun ABK. Adapun total pendapatan maksimum yang tertera pada tabel masih dalam jumlah kotor, nelayan juragan sebagai penanggung jawab masih perlu memotong hasil tersebut untuk modal berlayar (Rp 8.000.000 hingga Rp 10.000.000) dan pembayaran *tepekong* atau nahkoda kapal. Lalu setelah itu baru dibagi 50% untuk nelayan juragan dan 50% untuk nelayan ABK yang umumnya berjumlah 4 sampai 5 orang.

Menariknya relasi juragan dan *bakul* di Muarareja yang meminjamkan modal sejauh ini terjadi secara murni atas dasar jaringan semata atau digerakannya atas dasar kepercayaan *bakul* terhadap nelayan, sehingga peminjaman dari *bakul* ikan menawarkan keuntungan tertentu. Misalnya pada peminjaman menyentuh angka hingga lebih dari 50 juta rupiah untuk pembelian kapal seringkali tidak memerlukan

jaminan barang dan dapat dicairkan dengan cepat berdasarkan kepercayaan dan hubungan personal, serta tanpa ada batasan akhir waktu pembayaran hutang. Ini kontras dengan peminjaman dari koperasi atau bank yang biasanya memerlukan jaminan dan proses administrasi yang lebih kompleks, sehingga kurang diminati oleh kalangan nelayan di sana. Oleh karena itu, banyak nelayan di Muarareja lebih memilih berhutang pada *bakul* ikan meskipun harus menjual hasil tangkapan dengan harga lebih rendah selama masa hutang berlangsung. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh TR yang merupakan salah seorang juragan yang membeli kapalnya dengan meminjam modal dari *bakul*:

“Enyong tah ket wingi ngilenge nyilih karena wis kenal karo bakule, ora ana ikatan darah wong dudu sedulure, mung ya kaya kuwe mau nyong sing disilahi ya kudu tau diri, kabeh aman-aman baen sih anggo sistem kaya kuwe ora tau ana cek-cok sing nyong krungu”. (Wawancara, 15 Agustus 2023)
(Saya kemarin meminjam modal di bakul karena sudah saling kenal, tidak ada ikatan darah yang menghubungkan antara saya dan bakul tersebut untuk disebut sebagai keluarga, hanya saja demikian saya yang dipinjami pada dasarnya juga harus tahu diri, sejauh ini semuanya berjalan aman dengan sistem pinjam modal semacam ini karena tidak pernah ada pertengkaran yang saya dengar akibat hal ini).

Secara lebih lanjut, analisis relasi patron-klien di masyarakat nelayan Muarareja dapat dijelaskan melalui teori modal sosial Bourdieu, (2011) yang mencakup elemen kepercayaan, jaringan, dan norma sosial yang mengatur interaksi antar individu dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, modal sosial digunakan oleh *bakul* dan juragan untuk membangun dan mempertahankan hubungan patron-klien dengan nelayan kecil. Modal sosial, menurut Bourdieu (2005) adalah sumber daya yang muncul dari jaringan hubungan sosial yang dapat digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Pada masyarakat nelayan di Muarareja, *bakul* menggunakan modal sosialnya berupa jaringan kepercayaan dengan nelayan untuk meminjamkan modal tanpa melibatkan lembaga keuangan formal seperti bank maupun koperasi simpan pinjam. Temuan itu selaras dengan hasil penelitian Parappurathu et al. (2019) bahwa norma sosial dan kepercayaan di antara nelayan dan patron yang memfasilitasi peminjaman modal secara signifikan mampu mengurangi ketergantungan nelayan pada lembaga keuangan formal. Lebih lanjut, analisis oleh Siegelman et al. (2019) juga memperlihatkan bahwa nelayan yang berhutang pada *bakul* sering kali mendapatkan akses yang lebih cepat dan lebih mudah ke modal dibandingkan mereka yang mengandalkan bank atau koperasi.

Penelitian Steenbergen et al. (2019) menunjukkan bahwa kepercayaan dan jaringan sosial memainkan peran penting dalam transaksi ekonomi di komunitas nelayan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Begitu pula, penelitian oleh Drury O’Neill et al. (2019) menyoroti hubungan patron-klien yang mampu membantu nelayan mengakses sumber daya yang tidak tersedia melalui saluran formal. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian di Muarareja juga menunjukkan bahwa kepercayaan antara *bakul* dan nelayan menjadi fondasi utama dalam hubungan ini, yang memungkinkan terciptanya kesepakatan peminjaman modal secara lebih mudah, meskipun nelayan harus menjual hasil tangkapannya dengan potongan harga 2% lebih murah daripada harga pasar pada umumnya. Kondisi ini menunjukkan bagaimana modal sosial dapat digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan aktivitas ekonomi nelayan, yang pada gilirannya memperkuat posisi *bakul* sebagai patron. Seperti yang dijelaskan oleh Mikiewicz (2021) bahwa modal sosial memiliki dua sisi: dapat memperkuat kerjasama dan kepercayaan, tetapi juga dapat memperkuat ketidakadilan dan eksklusivitas sosial. Dalam kasus ini, relasi patron-klien yang didasarkan pada modal sosial menghambat modernisasi dan perkembangan ekonomi yang lebih adil bagi nelayan kecil, yakni nelayan ABK. Hal itu dikarenakan mereka juga harus ikut serta merasakan imbas dari berkurangnya jumlah pendapatan mereka atas hasil tangkapan yang diperoleh akibat perjanjian potongan penjualan yang dilangsungkan antara *bakul* dan nelayan juragan mereka. Karena modal sosial dalam bentuk jaringan kepercayaan ini tidak selalu diarahkan untuk kebaikan bersama, tetapi sering kali untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, maka nelayan kecil tetap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, Fowler (2020) menekankan bahwa modal sosial harus digunakan untuk keuntungan kolektif agar dapat meningkatkan kesejahteraan semua anggota masyarakat, bukan hanya sebagian.

Meski tidak semua juragan mengawali statusnya dengan pinjaman modal dari seorang *bakul*, juragan yang berhasil mendapatkan modal awal dari *bakul* merupakan mereka yang telah memiliki jaringan baik dengan pihak patron. Juragan tersebut menjaga kepercayaan yang diberikan oleh patron atau *bakul* dengan memupuk rasa solidaritas dan menjadi mitra *bakul* dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan apa yang disebut Bourdieu (2011) sebagai aset yang mampu memberi anggota kredit untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari relasi yang terjalin. Hubungan sosial yang terjalin memungkinkan nelayan kecil atau yang sebelumnya tidak memiliki kapal sendiri mendapatkan akses ke sumber daya untuk menjadi seorang juragan, dengan memanfaatkan relasi yang dimiliki bersama *bakul* (Bourdieu, 1983). Dengan demikian, hubungan patron-klien di Muarareja tidak hanya menghasilkan ketergantungan, tetapi juga menyediakan akses peluang bagi nelayan kecil untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Akses peluang ini mencerminkan potensi positif dari modal sosial yang dapat mengubah posisi individu dalam struktur sosial ekonomi, meskipun tetap terdapat risiko ketidakadilan dan eksploitasi. Namun demikian, relasi patron-klien yang berbasis kepercayaan dan solidaritas pada dasarnya menunjukkan bahwa jaringan sosial dan modal sosial dapat menjadi jalan bagi nelayan kecil untuk berkembang dan memperoleh manfaat yang lebih besar dalam industri perikanan. Temuan tersebut sekaligus selaras dengan penelitian Enayati et al. (2024) yang menguraikan bahwa jaringan kepercayaan yang kokoh antara nelayan dan *bakul* mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan keberlangsungan usaha nelayan itu sendiri.

Banteng Loreng Binncengan: Penciptaan Kualitas Pada Relasi Patron-Klien

Terdapat dua jenis nelayan yang tersebar di kawasan Muarareja, yakni nelayan pemilik kapal atau juragan, dan nelayan anak buah kapal yang disebut ABK atau nelayan kecil, mereka tidak memiliki kapal. Pola relasi nelayan juragan dan ABK yang terbentuk merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi untuk melangsungkan orientasi ekonomi sebagai rekan berlayar atau *mayang*. Dalam satu kapal ketika melakukan *mayang* pada jarak dekat yang hanya disekitaran Pulau Jawa maka umumnya dibutuhkan 4-5 ABK ditambah dengan nelayan juragan yang tidak harus ikut serta. Proses pencarian nelayan ABK umumnya dilakukan oleh juragan secara terbuka melalui sistem “siapa mau ikut, angkut” namun hal itu juga tak lepas dari relasi antar juragan dan ABK untuk dapat menjadi *partner* berlayar yang langgeng. Karena berdasarkan temuan di lapangan ternyata pihak nelayan ABK akan memilih ikut pada juragan yang bagi mereka “cocok”, maka kemudian diputuskan untuk senantiasa ikut proses *mayang* bersama juragan tersebut, namun apabila dirasa tidak cocok maka mereka tidak akan mau *mayang* lagi dengan juragan tersebut. Begitu juga dengan pihak juragan yang menyatakan hal serupa bahwa umumnya ketika relasi antara ABK dan juragan sudah cocok satu sama lain maka setiap berlayar sudah pasti yang akan diajak bersama adalah para nelayan ABK yang sama seperti sebelumnya secara berkelanjutan, kecuali jika salah satu ada yang sakit maka juragan baru akan menyediakan kesempatan terbuka lagi bagi nelayan ABK lain yang akan ikut. Prinsip kontinuitas dalam pemilihan ABK menunjukkan stabilitas dalam relasi kerja dan sosial di dalam komunitas nelayan (Berkes & Nayak, 2018).

Secara lebih lanjut, juragan umumnya memiliki kendali atas kapal dan lebih mudah untuk mempertahankan relasi kerja dengan ABK yang telah terbukti bekerja efektif, namun di sisi lain, ABK sering kali memiliki sedikit pilihan selain bergantung pada relasi tersebut untuk mencari nafkah (Shigefuji, 2024). Perbedaan kelas antara ABK dan juragan di Muarareja nampak secara jelas, dengan jumlah ABK yang jauh lebih banyak dibandingkan juragan, menjadikan kawasan Muarareja didominasi oleh kehidupan nelayan miskin. Jumlah ABK yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah juragan menunjukkan ketidakmerataan distribusi keuntungan di dalam industri ini (Roberts et al., 2022). Adapun potret kemiskinan pada masyarakat nelayan Muarareja tergambar melalui kawasan kumuh pemukiman ABK yang kerap tertimpa banjir rob akibat air Laut Muarareja dan Kali Kemiri yang naik sebagaimana terlihat pada Gambar 2 yang ditampilkan.



Gambar 2. Potret Pemukiman ABK di Muarareja (Sumber: Data Primer Penelitian, 2023)

Kondisi tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pemukiman rumah juragan yang meski di depan tambak namun jalan di depan rumahnya telah diaspal halus, rumah berpagar, dan umumnya memiliki halaman luas. Wajah ketimpangan lainnya nampak dari proses regulasi kelompok yang fungsi lainnya adalah untuk memudahkan sistem bantuan dari dinas pemerintahan kepada nelayan, namun sistem kelompok di kalangan nelayan hanya tersedia untuk kalangan nelayan juragan dan tidak untuk nelayan ABK. Ketimpangan dalam akses sumber daya ekonomi seperti ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di komunitas nelayan, dengan implikasi yang jauh lebih luas terhadap kesejahteraan mereka (Arthur et al., 2022; Bavinck et al., 2018; Said & MacMillan, 2020).

Gagasan Bourdieu (2018) tentang modal sosial juga kemudian dapat dilihat atas munculnya konflik kelas sebagai upaya persaingan untuk meningkatkan posisi dibanding yang lain. Diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari ketua perhimpunan nelayan juragan di Muarareja, saat ini telah terbentuk 20 kelompok nelayan pemilik kapal dengan setiap kelompoknya terdiri dari 17-25 anggota didalamnya. Hal itu berbanding terbalik dengan nelayan ABK yang tidak terfasilitasi untuk dapat menciptakan kelompok internal baik untuk regulasi penerimaan bantuan dari dinas maupun penguatan relasi antar ABK itu sendiri. Secara lebih lanjut, maka hal ini dapat dilihat sebagai yang diungkapkan Farihi dan Sugiarto (2022) akan adanya ketidakmampuan nelayan dalam mengembangkan organisasi akibat atas dominasi negara yang begitu kuat terhadap masyarakat nelayan kecil. Terdapatnya kesenjangan inilah yang menjadikan akses relasi antara nelayan juragan atau patron dengan nelayan ABK atau klien kemudian menjadi sesuatu yang krusial (McWilliam et al., 2021). Hal itu karena nelayan juragan berpotensi membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan ABK hanya ketika relasi yang terjalin diantara keduanya dapat terbangun dengan baik (Kunyati & Marta, 2022b; Teh et al., 2020).

Secara berkelanjutan, praktik relasi patron-klien antara juragan dan *bakul* pemberi modal di Muarareja juga tercermin dalam falsafah *banteng loreng binoncengan* (Achmad, 2022). Dalam hubungan ini, patron (*bakul*) dianggap memiliki kekuasaan atas klien (juragan yang menerima modal), yang mengizinkannya untuk mengarahkan dan mengendalikan sistem penjualan ikan. Meskipun demikian, dalam konteks yang bermakna, sistem ini dianggap saling menguntungkan baik bagi patron maupun klien karena menghindarkan mereka dari ketergantungan pada pinjaman bank (Phelan et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa keberadaan sistem peminjaman berbasis kepercayaan ini sekaligus mempromosikan kolegialitas di antara nelayan (Islam & Chuenpagdee, 2022). Nelayan juragan, sebagai klien utama, menunjukkan tanggung jawab yang tinggi terhadap patron mereka, dengan selalu memprioritaskan *bakul* sebagai konsumen utama dalam penjualan ikan mereka. Oleh karena itu, manajemen konflik yang mampu diminimalisir dalam sistem peminjaman berbasis kepercayaan ini mencerminkan penerapan *banteng loreng binoncengan* yang mendorong solidaritas dan kolegialitas tinggi dalam kehidupan masyarakat.

Falsafah *banteng loreng binoncengan* merupakan simbol dari kerjasama dan kesetiaan dalam budaya lokal Kota Tegal yang mencerminkan kualitas dalam relasi patron-klien antara nelayan juragan dan ABK di Muarareja. *Banteng loreng binoncengan* menggambarkan bahwa meskipun ada perbedaan status dan kelas yang signifikan antara juragan yang memiliki kapal dan ABK yang bekerja sebagai anak buah kapal, mereka saling melengkapi dan bekerja sama dalam orientasi ekonomi mereka. Menurut Achmad

(2022), falsafah ini tidak hanya mendorong solidaritas dan kebersamaan dalam bekerja, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antar anggota komunitas nelayan.

Dalam konteks Muarareja, relasi patron-klien yang didasarkan pada falsafah *banteng loreng binoncengan* menunjukkan bahwa keberhasilan juragan dalam membangun jaringan sosial yang kuat dengan ABK dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Bourdieu (2011), modal sosial yang terbentuk dari relasi seperti ini dapat menjadi sumber keuntungan ekonomi dan juga meningkatkan posisi sosial nelayan dalam hierarki masyarakat lokal. Penelitian lain mengenai hubungan patron-klien di daerah pesisir Indonesia juga menunjukkan bahwa kepercayaan, solidaritas, dan bantuan sosial merupakan elemen krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan tersebut (Rusydi et al., 2021; Samah et al., 2023). Namun demikian, pentingnya menjaga kesetiaan dan keadilan dalam hubungan ini agar tidak boleh diabaikan, karena ketidakseimbangan kekuatan antara juragan dan ABK dapat menyebabkan eksploitasi dan ketimpangan yang lebih dalam. Dalam hubungan antara patron dan klien, juragan menganggap ABK sebagai bagian dari keluarga mereka ketika mereka berhasil menjadi mitra dalam jangka panjang. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan seorang nelayan juragan, diungkapkan bahwa mereka sering kali memperlakukan ABK seperti keluarga, memberikan bantuan dukungan finansial saat ABK sakit atau dalam momen kebutuhan keuangan yang mendesak. Ketika relasi berjalan dengan baik, mereka bahkan bisa menjadi teman saat beristirahat di darat dan memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan. Di sinilah praktik modal sosial muncul, sumber daya yang dihasilkan dari hubungan antara patron dan klien bukan hanya berfokus pada orientasi ekonomi semata, tetapi juga nilai-nilai kekeluargaan yang saling membantu (Bourdieu, 1983). Hal ini selaras dengan temuan (Yayah et al., 2024) yang menyatakan modal sosial ini terpelihara melalui gegar budaya, yang merujuk pada kesesuaian nilai, norma, dan praktik individu dalam masyarakat, yang dibangun melalui pemahaman bersama, saling pengertian, dan kohesi sosial berdasarkan tradisi yang sama. Hal tersebut sebagaimana yang tercermin dalam manifestasi falsafah *banteng loreng binoncengan* yang dilangsungkan melalui tindak kolegialitas dan solidaritas.

Oleh karena itu, konsep *banteng loreng binoncengan* bukan hanya sebagai metafora tetapi juga sebagai panduan praktis untuk menjaga integritas dalam relasi patron-klien di Muarareja. Dengan memahami dan menerapkan falsafah ini, nelayan dapat membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Temuan ini sekaligus selaras dengan hasil penelitian Humbas (2021) dan Ariadi et al. (2022) yang mendukung kolaborasi nilai-nilai budaya lokal dalam konteks penguatan relasi patron-klien di daerah pesisir.

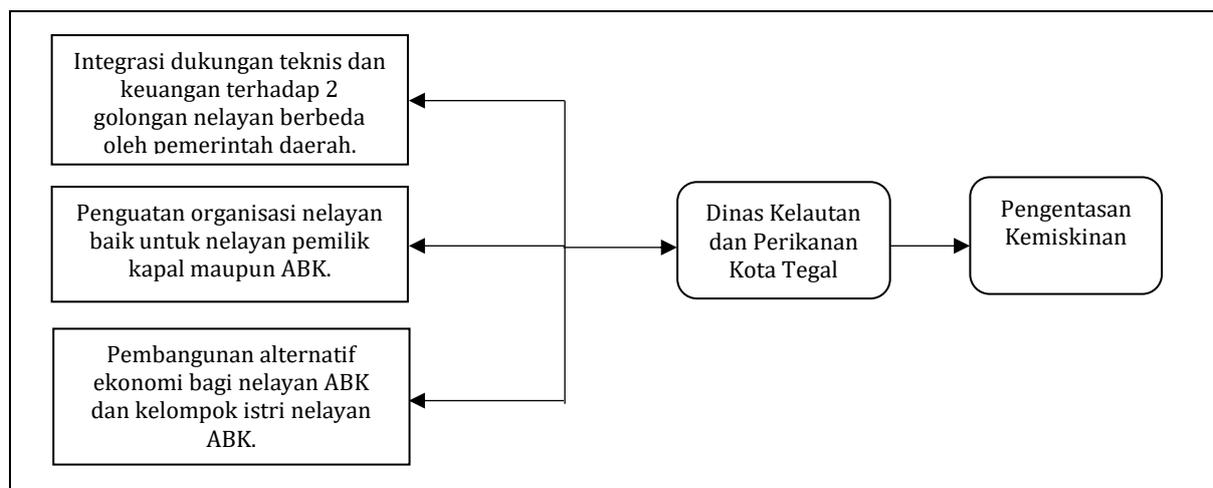
Hasil Sumberdaya yang Mapan dari Relasi Patron-Klien

Berdasarkan uraian sebelumnya, relasi patron-klien yang dimiliki masyarakat Muarareja sebenarnya berpotensi untuk dapat diangkat dalam model pembangunan kemiskinan. Teori modal sosial Bourdieu (2018) menjelaskan bahwa modal sosial yang terbangun dalam jaringan patron dan klien dapat menghasilkan pola relasi yang saling menguntungkan satu sama lain. Modal sosial yang ditampilkan baik antar *bakul*-juragan maupun juragan-ABK menunjukkan jalinan yang menghubungkan individu dan kelompok masyarakat di Muarareja, yang dapat memberi dampak positif bagi satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bourdieu (2011) bahwa ikatan yang menghubungkan patron dan klien tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil interaksi individual maupun kolektif yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, sehingga mampu menghasilkan relasi jangka panjang.

Modal sosial termanifestasi melalui hubungan dan jaringan yang menjadi sumber daya berguna dalam menentukan serta mereproduksi kedudukan sosial masyarakat (Alamin & Uyun, 2022; Fathy, 2019). Modal sosial ini dimiliki oleh pelaku, baik patron maupun klien, dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dihasilkan atas relasi yang mapan (Bourdieu, 1983). Ditambah lagi, masyarakat Tegal memiliki falsafah *banteng loreng binoncengan*, yang menekankan nilai kolegialitas dan solidaritas. Nilai-nilai ini terimplementasi dalam pola relasi patron-klien masyarakat nelayan di Muarareja. Dengan mengoptimalkan modal sosial ini secara sinergis, maka diharapkan dapat membantu Muarareja dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan

kemiskinan. Hal itu didukung dengan hasil temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa modal sosial mampu berperan penting dalam memperkuat jaringan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anggraini & Agus, 2018; Duy et al., 2022; Richmond & Casali, 2022). Dengan demikian, modal sosial dapat menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Muarareja.

Model pendekatan integratif dapat diterapkan karena pada pendekatan ini bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga penilaian normatif serta adanya syarat yang harus terpenuhi agar dapat keluar dari jerat kemiskinan, sehingga perlu untuk menilai kemiskinan dari pandangan orang miskinnya sendiri, dalam hal ini peranan nelayan kecil perlu dilibatkan agar dapat terpenuhi hak-hak dasarnya (Nurdin, 2023). Oleh karena itu upaya ini perlu kerja keras yang berkelanjutan dari tiap-tiap pihak terlibat, baik dengan pemerintah maupun masyarakat sekitar. Penulis mencoba memformulasikan model pengentasan kemiskinan dengan kasus dan potensi yang dimiliki kawasan Muarareja melalui tampilan Gambar 1.



Gambar 1. Formula Pengentasan Kemiskinan (Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024)

Berdasarkan Gambar 1, maka untuk mengentaskan kemiskinan di Muarareja secara efektif, langkah pertama adalah mengintegrasikan dukungan teknis dan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kedua golongan nelayan yang berbeda, yakni nelayan pemilik kapal (juragan) dan nelayan anak buah kapal (ABK). Juragan membutuhkan akses yang lebih baik terhadap modal untuk pengembangan perikanan tangkap mereka. Ini dapat diwujudkan melalui program kredit mikro yang terjangkau dan pelatihan manajemen keuangan. Sebagai contoh, penelitian oleh Zikri (2024) menunjukkan bahwa akses kredit mikro dapat meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah. Sementara itu, ABK memerlukan pelatihan keterampilan dan akses ke alternatif ekonomi selain melaut, seperti keterampilan pengolahan ikan atau usaha kerajinan. Pemerintah daerah juga dapat mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan khusus bagi ketua nelayan dari kedua golongan ini, yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis tetapi juga menanamkan kembali nilai-nilai kepemimpinan yang tercermin dalam falsafah *banteng loreng binoncengan*. Menurut (Susanti et al., 2023), pendidikan keterampilan dan pelatihan kepemimpinan yang berbasis komunitas dapat meningkatkan kapasitas dan kohesi sosial.

Lalu, penguatan organisasi nelayan baik untuk kelompok juragan maupun ABK juga sangat penting. Organisasi ini akan membantu meningkatkan koordinasi antar nelayan dalam hal manajemen sumber daya perikanan, pemasaran hasil tangkapan, dan pembangunan infrastruktur lokal yang mendukung kegiatan perikanan. Dengan demikian, mereka dapat mengoptimalkan potensi ekonomi mereka dengan tetap memperkuat solidaritas dan kolaborasi di antara anggota kelompok. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Nurlita et al. (2023) yang menemukan bahwa pembentukan kelompok usaha bersama di sektor perikanan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya serta pemasaran hasil tangkapan. Selain itu, studi oleh Sriyono dan Dewi (2021) menunjukkan bahwa penguatan organisasi nelayan dapat meningkatkan akses mereka terhadap informasi pasar, teknologi, dan sumber daya

keuangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Penelitian lain oleh Sukomardojo et al. (2023) juga menggarisbawahi pentingnya organisasi komunitas dalam membangun kapasitas adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim dan tantangan ekonomi. Dengan memperkuat organisasi nelayan, Muarareja dapat membangun struktur sosial yang lebih kokoh dan berdaya tahan, yang esensial untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut. Selanjutnya, pembangunan alternatif ekonomi menjadi penting terutama bagi nelayan ABK dan kelompok istri nelayan ABK, yang sering kali membutuhkan pendapatan tambahan di luar kegiatan melaut. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan usaha mikro dan menengah, seperti produksi kerajinan lokal atau agrowisata pesisir, yang dapat memberikan sumber penghasilan tambahan yang stabil. Penelitian oleh Pomeroy et al. (2020) menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi di sektor perikanan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga nelayan.

Tahapan berikutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tegal harus memainkan peran penting dalam koordinasi, fasilitasi, dan monitor terhadap implementasi program ini di tingkat lokal. Dinas ini harus dapat menyediakan bantuan teknis dan keuangan yang diperlukan, serta mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan program-program ini berjalan lancar dan berkelanjutan. Menurut Kirana dan Artisa (2020), peran aktif dinas terkait dalam fasilitasi dan koordinasi sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan berbasis komunitas. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk membangun kemampuan masyarakat nelayan di Muarareja untuk mengentaskan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Ini mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui diversifikasi pendapatan, penguatan jaringan sosial dan organisasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan tangkap. Dengan demikian, masyarakat nelayan diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi tantangan ekonomi serta sosial di lingkungan mereka sendiri, sejalan dengan nilai-nilai lokal dan falsafah yang menekankan solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama (Albareda & Sison, 2020; Chowdhury et al., 2021; Villalba-Eguiluz et al., 2020).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa poin berikut, pertama bahwa modal sosial yang kuat antara nelayan dan *bakul* ikan di Muarareja memainkan peran kritis dalam dinamika ekonomi mereka, memungkinkan akses ke modal yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan mendesak. Kedua, relasi patron-klien yang didasarkan pada falsafah *banteng loreng binoncengan* menunjukkan bahwa keberhasilan patron dalam membangun jaringan sosial yang kuat dengan klien dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi kedua belah pihak. Dengan memahami dan menerapkan falsafah ini, nelayan dapat membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Ketiga, relasi patron-klien di Muarareja menunjukkan potensi besar untuk digunakan dalam model pembangunan kemiskinan dengan memanfaatkan modal sosial yang terjalin antara *bakul*-juragan dan juragan-ABK. Pendekatan integratif yang mengoptimalkan nilai kolegalitas dan solidaritas dari falsafah *banteng loreng binoncengan* serta modal sosial dapat digerakkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian, maka secara praktis, pemerintah daerah dan organisasi nelayan di Muarareja sebaiknya mendirikan pusat pelatihan yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis nelayan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran hasil tangkapan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai falsafah *banteng loreng binoncengan*. Selain itu, perlu dibentuk kelompok-kelompok usaha bersama untuk memperkuat jaringan sosial dan solidaritas antar nelayan, yang dapat difasilitasi melalui program pendampingan dan akses permodalan yang lebih fleksibel untuk mengatasi kebutuhan mendesak. Sementara pada bidang akademis, diperlukan studi yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan nilai-nilai lokal pada pembangunan komunitas masyarakat pesisir, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Penelitian tersebut nantinya harus mempertimbangkan berbagai metode evaluasi yang kuat dan penerapan penelitian komparatif antar daerah untuk dapat menginformasikan kebijakan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan agar mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan jaringan sosial di komunitas pesisir.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. B. (2022). *Jarang yang Tahu! Watak Orang Tegal Diibaratkan Banteng Loreng Binoncengan, Apa Penjelasannya?* <https://banyumas.tribunnews.com/2022/03/28/jarang-yang-tahu-watak-orang-tegal-diibaratkan-banteng-loreng-binoncengan-apa-penjelasannya?page=2>
- Alamin, T., & Uyun, A. A. (2022). Analisis Modal Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program E-Warung Di Kota Kediri. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 20(2), 199–219. <https://doi.org/10.30762/realita.v20i2.137>
- Alamsyah, H. K., Kusnandar, Mulyani, S., Simanjuntak, S. W., Zuhry, N., & Nugroho, B. S. (2023). Sustainability Status of Capture Fisheries Management in The Coastal Area of Tegal City Based on Multi-Dimensional Scaling (MDS). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1147(1), 012010. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1147/1/012010>
- Albareda, L., & Sison, A. J. G. (2020). Commons Organizing: Embedding Common Good and Institutions for Collective Action. Insights from Ethics and Economics. *Journal of Business Ethics*, 166(4), 727–743. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04580-8>
- Anggraini, O., & Agus, M. (2018). Penguatan Modal Sosial Berbasis Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir Perspektif Gender di Kabupaten Bantul. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 11(2), 11. <https://doi.org/10.19184/jsep.v11i2.6889>
- Ariadi, H., Mujtahidah, T., & Hidayati, S. (2022). Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12(2), 137. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11315>
- Arthur, R. I., Skerritt, D. J., Schuhbauer, A., Ebrahim, N., Friend, R. M., & Sumaila, U. R. (2022). Small-scale fisheries and local food systems: Transformations, threats and opportunities. *Fish and Fisheries*, 23(1), 109–124. <https://doi.org/10.1111/faf.12602>
- Bakhtiar, A. F., Rochwulaningsih, Y., & Susilowati, E. (2020). Coastal Community Development and Fisheries Resource Management Project (Co-Fish Project) in Tegal of 1998-2005 and Its Impacts on Fishing Communities. *E3S Web of Conferences*, 202. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020202013>
- Bavinck, M., Jentoft, S., & Scholtens, J. (2018). Fisheries as social struggle: A reinvigorated social science research agenda. *Marine Policy*, 94, 46–52. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.04.026>
- Berkes, F., & Nayak, P. K. (2018). Role of communities in fisheries management: “one would first need to imagine it.” *Maritime Studies*, 17(3), 241–251. <https://doi.org/10.1007/s40152-018-0120-x>
- Bourdieu, P. (1983). The field of cultural production, or: The economic world reversed. *Poetics*, 12(4–5), 311–356.
- Bourdieu, P. (2005). *The Social Structures of The Economy*. Polity.
- Bourdieu, P. (2011). The forms of capital (1986). *Cultural Theory: An Anthology*, 1, 81–93.
- Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. In *The sociology of economic life* (pp. 78–92). Routledge.
- BPS Kota Tegal. (2021). *Kota Tegal dalam Angka: Tegal Municipality in Figures 2021*. BPS Kota Tegal.
- Chowdhury, J. S., Wahab, H. A., Mohd Saad, M. R., Roy, P. K., Hamidi, M., & Ahmad, M. M. (2021). *Ubuntu Philosophy* (pp. 361–381). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7480-5.ch022>
- Darmin, D. (2023). Pendekatan CEPA (Collaborative, Ecology, Planning, Administrative) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulsel*, 4(2), 134–153. <https://doi.org/10.58643/sipatokkong.v4i2.229>
- Dashfordate, A., & Winoto, D. E. (2023). Patron-client Role in Duan-lolat Tradition in the Latdalam Fisherman Community. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(3), 480–490. <https://doi.org/https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i3.897>
- Drury O'Neill, E., Crona, B., Ferrer, A. J. G., & Pomeroy, R. (2019). From typhoons to traders: the role of patron-client relations in mediating fishery responses to natural disasters. *Environmental Research Letters*, 14(4), 045015. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab0b57>
- Duy, D. T., Trung, T. Q., Lan, T. H. P., Berg, H., & Thi Da, C. (2022). Assessment of the impacts of social capital on the profit of shrimp farming production in the Mekong Delta, Vietnam. *Aquaculture Economics & Management*, 26(2), 152–170. <https://doi.org/10.1080/13657305.2021.1947414>
- Elanda, Y., & Alie, A. (2021). Strategi Masyarakat Nelayan dalam Pemenuhan Kebutuhan Subsistennya di Desa Wisata Pasir Putih Dalegan Gresik. *Journal of Urban Sociology*, 3(2), 41. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1234>
- Elsler, L. G., Neil, M., Ferse, S., Navarrete Forero, G., Glaser, M., & Schlüter, M. (2023). Compliance in small-scale fisheries is linked to fisher-trader relations: not fishers alone (Southeast Asian case study). *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 33(3), 751–766. <https://doi.org/10.1007/s11160-023-09783-6>

- Emy, K. R. (2020). Conflict and Reconciliation in the Patron-Clientelism Social Structure in the Puger Kulon Fishing Village, Jember Regency. *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.049>
- Enayati, M., Arlikatti, S., & Ramesh, M. V. (2024). A qualitative analysis of rural fishermen: Potential for blockchain-enabled framework for livelihood sustainability. *Heliyon*, 10(2), e24358. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24358>
- Farihi, M. I., & Sugiarto, E. (2022). Aktivitas Nelayan Muarareja sebagai Inspirasi Berkarya. *Eduarts : Journal of Arts Education*, 11(3). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/catharsis>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Fowler, B. (2020). Pierre Bourdieu on social transformation, with particular reference to political and symbolic revolutions. *Theory and Society*, 49(3), 439–463. <https://doi.org/10.1007/s11186-019-09375-z>
- Frawley, T. H., González-Mon, B., Nenadovic, M., Gladstone, F., Nomura, K., Alberto Zepeda-Domínguez, J., Rodriguez-Van Dyck, S., Ferrer, E. M., Torre, J., Micheli, F., Leslie, H. M., & Basurto, X. (2024). Self-governance mediates small-scale fishing strategies, vulnerability and adaptive response. *Global Environmental Change*, 84, 102805. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2024.102805>
- Handayani, S., Qurrata, V., & Purnamasari, V. (2022). Patron Client Relations as A Semi Trust Financing Contract on Agency Theory in Marine Fisheries. *Proceedings of the 1st International Conference on Economic and Education, ICON 2021, 14 - 15 December 2021, Padang-West Sumatra, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-12-2021.2318361>
- Hansyaekh, M. N. (2022). Management of Levies at Fish Auction Places in Increasing Regional Original Income in Cirebon Regency. *Social Impact Journal*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.61391/sij.v1i1.4>
- Hu, Q., Zhang, T., Jiao, Z., Duan, Y., Dewancker, B. J., & Gao, W. (2022). The impact of fishery industrial transformation on rural revitalization at village level: A case study of a Chinese fishing village. *Ocean & Coastal Management*, 227, 106277. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106277>
- Humbas, J. G., M. J. D., & W. S. J. (2021). A Study of Patron-Client Relationship Between Fisherman and Supplier In Kema. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.34741>
- Irawan, R. (2022). Punggawa-Sawi Values Education in Overseas Bugis Ethnic Family as Local Wisdom of The Fisherman Community (Description Analysis Fisherman Society On Coast Bandar Lampung). *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research*, 2(3), 108–119. <https://doi.org/10.46336/ijeer.v2i3.305>
- Islam, M. M., & Chuenpagdee, R. (2022). Towards a classification of vulnerability of small-scale fisheries. *Environmental Science & Policy*, 134, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.03.023>
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2023). *Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK)*.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Kunyati, S. A., & Marta, D. C. V. (2022a). Karl Marx's sociological review on the social class of the fisherman community in Cirebon district. *International Journal of Health Sciences*, 7116–7130. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS3.7719>
- Kunyati, S. A., & Marta, D. C. V. (2022b). Karl Marx's sociological review on the social class of the fisherman community in Cirebon district. *International Journal of Health Sciences*, 7116–7130. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS3.7719>
- Kusumawati, E. D., Karjono, K., & Karmanis, K. (2024). Pengaruh Marketing Mix terhadap Peningkatan Produktifitas Hasil Tangkap Ikan Masyarakat Pesisir Kendal. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 26(1), 99–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v26i1.434>
- Lauder, M. R. M. T., & Lauder, A. F. (2016). Maritime Indonesia and the Archipelagic Outlook: Some reflections from a multidisciplinary perspective on old port cities in Java. *Wacana*, 17(1), 97–120. <https://doi.org/10.17510/wacana.v17i1.428>
- Leniwati, D., Widyastuti, A., Sholana, R., Latifah, S. W., & Mawardi, F. D. (2022). Interpreting the Concept of Debt Based on Indonesian Patron-Client Perspective. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 5(2), 215–232. <https://doi.org/10.33005/jasf.v5i2.291>
- Mamengko, R. P., & Kuntari, E. D. (2021). Pengelolaan Pariwisata Bahari berbasis Community-Based Tourism dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Media Wisata*, 18(1), 1–20. <https://doi.org/10.36276/mws.v18i1.72>

- Marhadi, A., Suraya, R. S., Astarika, R., & Kasmin, M. O. (2023). Hegemony And the Impact Of Poverty On Bajo Fishermen Society. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 34, 5408–5424. <https://doi.org/https://doi.org/10.59670/jns.v34i.2407>
- McWilliam, A. R., Wianti, N. I., & Taufik, Y. (2021). Poverty and prosperity among Sama Bajo fishing communities (Southeast Sulawesi, Indonesia). *Singapore Journal of Tropical Geography*, 42(1), 132–148. <https://doi.org/10.1111/sjtg.12349>
- Mikiewicz, P. (2021). Social capital and education – An attempt to synthesize conceptualization arising from various theoretical origins. *Cogent Education*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1907956>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudzakir, A. K., Boesono, H., & Harahap, H. Y. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nelayan Artisanal di Kota Tegal. *Marine Fisheries*, 14(1), 39–51.
- Munguia-Vega, A., Zepeda-Dominguez, J. A., Perez-Alarcon, M. F., Amador-Castro, I. G., Fulton, S., Walther, M., Rodriguez-Fuentes, M., Fumero-Andreu, C. M., & Torre, J. (2022). Social-ecological networks and connectivity within and between two communities of small-scale fishers in Mexico. *Ecology and Society*, 27(1), art24. <https://doi.org/10.5751/ES-13055-270124>
- Nunan, F., Cepić, D., Onyango, P., Salehe, M., Yongo, E., Mbilingi, B., Odongkara, K., Mlahagwa, E., & Owili, M. (2020). Big fish, small fries? The fluidity of power in patron-client relations of Lake Victoria fisheries. *Journal of Rural Studies*, 79, 246–253. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.021>
- Nurdin, M. F. (2023). Kemiskinan Global. In *Class Teaching* (pp. 1–6).
- Nurlita, M., Wulandari RH, D. S. S., Ali, H., Nidya, R. F., Pratama, F. P., Annur, M. A., Nurhaliza, N., Damayanti, E., Avianitta, D., Nerlita, N., Ristawati, R., Bakri, H., & Silnawati, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Kombinasi Bahan Pengasapan Terhadap Cita Rasa Ikan Teri (KAHOLEO) Asap dalam Meningkatkan Manajemen Produksi dan Pemasaran Ikan Teri di Desa Boneatiro Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. *Kamba Mpu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17–26. <https://doi.org/10.55340/kambampu.v1i1.1205>
- Parappurathu, S., Ramachandran, C., Baiju, K. K., & Xavier, A. K. (2019). Formal versus informal: Insights into the credit transactions of small-scale fishers along the south west coast of India. *Marine Policy*, 103, 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.032>
- Phelan, A. (Any), Ross, H., Adhuri, D. S., & Richards, R. (2023). Equity in a sea of debt: how better understanding of small-scale fisheries can help reel in sustainable seafood. *ICES Journal of Marine Science*, 80(8), 2222–2232. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsac020>
- Pomeroy, R., Arango, C., Lomboy, C. G., & Box, S. (2020). Financial inclusion to build economic resilience in small-scale fisheries. *Marine Policy*, 118, 103982. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103982>
- Putri, D. A. A., Setyowati, R., & Wibowo, A. (2021). Peran Kelompok Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. *JEPA: Jurnal Kajian Ekonomi Kebijakan Publik*, 6(2), 571–578.
- Rahmiyati, N., & Rachmawati, T. (2023). Strategy model of coastal women's economic empowerment (fisherman's wife) based on blue economy and local potential in kenjeran beach tourism location city of Surabaya. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 363. <https://doi.org/10.29210/020232379>
- Richmond, L., & Casali, L. (2022). The role of social capital in fishing community sustainability: Spiraling down and up in a rural California port. *Marine Policy*, 137, 104934. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104934>
- Roberts, N., Mengge, B., Utina, Muh. R., Muhatar, F., Anugerah, Iwardanhi, A., Muhammad Zulkifli, R., & Humphries, A. (2022). Patron-client relationships shape value chains in an Indonesian island-based fisheries system. *Marine Policy*, 143, 105142. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105142>
- Rohayati, Kinseng, R. A., & Satria, A. (2018). Cantrang dan kemiskinan nelayan di kota tegal jawa tengah. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3), 204–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.19843>
- Rusydi, B. U., Wahyudi, W., & Ulfa, M. (2021). Hubungan Patron-Klien pada Komunitas Nelayan dalam Kerangka Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 27–44. <https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.2158>
- Safitri, R. M. (2018). Menjadi Perempuan Tambak Lorok: Konstruksi Gaya Hidup Perempuan Muslim Pesisir. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(2), 149–168. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2731>
- Said, A., & MacMillan, D. (2020). 'Re-grabbing' marine resources: a blue degrowth agenda for the resurgence of small-scale fisheries in Malta. *Sustainability Science*, 15(1), 91–102. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00769-7>

- Samah, A. A., Maruf, A., Ahmad, N., & Hamsan, H. (2023). Patron-Client Relationships and Transformative Capacity: A Case Study of Bajau Fishers in Wakatobi, Indonesia's Response to Climate Change. *Journal of Marine and Island Cultures*, 12(3). <https://doi.org/10.21463/jmic.2023.12.3.18>
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shaleh, K. S., Sinaga, O., & Roespinoedji, D. (2021). Village Budget and Patron-Client Social Relations: Implications for Fraud: A Geographical Review. *Review of International Geographical Education Online*, 11(1), 720–725. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800611>
- Shigefuji, T. (2024). Less than equals, more than comrades: variety of patron–client relations in the Hawaiian longline tuna fishing industry. *Asian Anthropology*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/1683478X.2023.2294657>
- Siegelman, B., Haenn, N., & Basurto, X. (2019). “Lies build trust”: Social capital, masculinity, and community-based resource management in a Mexican fishery. *World Development*, 123, 104601. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.031>
- Sriyono, S., & Dewi, S. R. (2021). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1697>
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, 132, 104654. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>
- Steenbergen, D. J., Fabinyi, M., Barclay, K., Song, A. M., Cohen, P. J., Eriksson, H., & Mills, D. J. (2019). Governance interactions in small-scale fisheries market chains: Examples from the Asia-Pacific. *Fish and Fisheries*, 20(4), 697–714. <https://doi.org/10.1111/faf.12370>
- Sukomardojo, T., Tabran, Muh., Al Muhtadin, M., Gymnastiar, I. A., & Pasongli, H. (2023). Mendorong Perilaku Konservasi Lingkungan di Komunitas Pesisir: Pelajaran dari Inisiatif Berbasis Masyarakat. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(2), 22–31. <https://doi.org/10.54783/ap.v4i2.25>
- Susanti, I., Syihabudin, D., Septiani, W., & Melani, M. (2023). Optimasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Organisasi Komunitas Melalui Pelatihan dan Konseling di Leuwigoong Garut. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 32–36. <https://doi.org/10.56457/dinamika.v1i2.479>
- Suyono, S., Nugroho, K., & Windyastuti, D. (2021). Analysis of patron-client political communication in building a network of political power in the village community. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i1.3099>
- Syafei, L. S., & Sudinno, D. (2018). Ikan Asing Invasif, Tantangan Keberlanjutan Biodiversitas Perairan. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 12(3), 149–165. <https://doi.org/10.33378/jppik.v12i3.106>
- Syahmadani, K. A. (2016). *Banteng Loreng Binoncengan, Falsafah Lokal Tegal*.
- Taufik, M. (2022). Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Melalui Pembinaan Masyarakat Nelayan Oleh Pangkalan Tni Al Tegal. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 399–404. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3756%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3756/2426>
- Teh, L. C. L., Ota, Y., Cisneros-Montemayor, A. M., Harrington, L., & Swartz, W. (2020). Are fishers poor? Getting to the bottom of marine fisheries income statistics. *Fish and Fisheries*, 21(3), 471–482. <https://doi.org/10.1111/faf.12441>
- Utami, R. Z., Suryana, A. A. H., Apriliani, I. M., & Maulina, I. (2023). The Social Characteristics of Fisherman Communities in Cangkol Village, Cirebon, Indonesia. *Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research*, 24(2), 16–26. <https://doi.org/10.9734/ajfar/2023/v24i2629>
- Vibriyanti, D. (2014). Kondisi sosial ekonomi nelayan tangkap Kota Tegal Jawa Tengah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Villalba-Eguiluz, U., Egia-Olaizola, A., & Pérez de Mendiguren, J. C. (2020). Convergences between the Social and Solidarity Economy and Sustainable Development Goals: Case Study in the Basque Country. *Sustainability*, 12(13), 5435. <https://doi.org/10.3390/su12135435>
- Winda, W. (2023). Analisis Kebudayaan dan Lingkungan Masyarakat Pesisir di Dusun XV-XVI Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Pubhealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(6), 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.56211/pubhealth.v1i4.240>
- Yayeh, F. A., Ferede, W., & Demissie, W. M. (2024). Debating the Relationship Between Social Capital and Economic Development in Ethiopia. *Forum for Social Economics*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/07360932.2024.2341662>
- Zikri, H. (2024). Transformasi Ekonomi Digital untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM di Indonesia. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 16–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.52029/gose.v2i1.206>